

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Bagi semua negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang pasti adanya dan sangat sulit dihilangkan. Berbagai kebijakan dan program yang telah diterapkan oleh pemerintah, organisasi sektor swasta sampai individu dirasa masih belum bisa membuat kemiskinan benar-benar menghilang dari muka bumi, upaya tersebut hanya cukup untuk menekan angka kemiskinan dan bukan menghilangkannya. Hal ini disebabkan karena kemiskinan bersifat multidimensional, yang berarti karena manusia mempunyai kebutuhan yang sangat beragam, maka kemiskinan juga memiliki banyak versi seperti miskin dalam bidang finansial, miskin dalam bidang standart yang telah ditetapkan masyarakat, miskin dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. (World Bank, 2012)

Menurut Rejekiingsih (2011) Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Kemiskinan juga merupakan *cross sectors problem*, *cross areas* dan *cross generation*, sehingga untuk menanganinya dibutuhkan pendekatan yang terpadu komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mensukseskan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan dibutuhkan *political will*.

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standart hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun secara sosiologis.

Menurut penelitian Andika dan Hastarini (2011) Kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh factor yang saling berhubungan antara lain, pendapatan masyarakat, pengangguran, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, gender, geografis, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang dan kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermatabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup,

rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Menurut Amalia (2012) Faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan merupakan jembatan menuju masa depan suatu bangsa. Karena pendidikan menyangkut karakter pembangunan dan pertahanan jati diri seseorang dalam suatu bangsa. Seseorang diharuskan memiliki pendidikan setinggi-tingginya agar mampu mendapatkan pekerjaan. Saat seseorang ingin bekerja untuk mendapatkan gaji yang tinggi maka seseorang tersebut harus memiliki pendidikan yang tinggi pula, karena jika pendidikan dia tinggi maka dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Tambunan (2001) salah satu faktor timbulnya kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran merupakan suatu hal yang melekat pada kemiskinan, karena kurangnya lapangan pekerjaan untuk mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak adanya pemerataan lapangan pekerjaan juga menjadi penyebab membludaknya angka pengangguran, Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki tingkat pengangguran cukup tinggi ketertinggalan perkembangan teknologi menyulitkan terbukanya lapangan pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban sebesar 191.100 jiwa atau 16,64% dari total penduduk. Ini merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan karena setiap tahunnya

tingkat kemiskin di Kabupaten Tuban terus saja meningkat, walaupun meningkatnya masih belum dikategorikan drastis. Pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Tuban mencapai angka 15,31% atau sebesar 178.640 jiwa dan membuat Kabupaten Tuban bertengger di posisi lima besar sebagai tingkat kemiskinan tertinggi dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan langkah-langkah pembaharuan awal seperti sudah ditemukannya banyak berdiri industri-industri yang cukup besar. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu telah dibangun pabrik kilang minyak yang berada di Kabupaten Jenu dengan nilai investasi yang sangat fantastis yaitu sebesar Rp. 199,3 Triliun . Dan tentu saja dengan berdirinya berbagai macam industri baru di Kabupaten Tuban mampu menumbuhkan harapan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah tentang meningkatnya kesejahteraan penduduk.

Dengan berdirinya sektor industri di Kabupaten Tuban dapat menunjukkan bahwa Tuban adalah daerah yang ramah terhadap investasi. Tetapi, apakah keberadaan industri-industri tersebut selain mendorong pertumbuhan ekonomi juga harus dipastikan membawa udara kesejahteraan untuk masyarakat Tuban? Sangat penting untuk memastikan banjirnya industri tersebut harus berbanding lurus pula dengan kemajuan teknologi dan kesejahteraan penduduknya.

Ada beberapa alasan mengapa dengan berdirinya perindustrian dapat mendatangkan hal positif untuk Kabupaten Tuban. Pertama, keberadaan industrialisasi membawa pengaruh sosial yang cukup besar. Seperti perubahan pada pola pikir agraris menjadi pola pikir industrialis yang berbasis teknologi. Kedua, terjadi pengurangan sumber kehidupan menjadi basis mata pencaharian sebagian masyarakat. Seperti berkurangnya lahan pertanian sehingga masyarakat butuh beralih mendapatkan pendapatan tambahan. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah dilakukan jika penyerapan tenaga kerja sektor industri membutuhkan keahlian khusus. Selain itu juga dibutuhkan pengetahuan dan penelitian terkait apa saja faktor-faktor yang kiranya dapat meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Tuban, karena hal tersebut dapat dijadikan titik terang awal permulaan mengenai pengentasakn kemiskinan di Kabupaten Tuban dengan melakukan berbagai macam evaluasi dan perbaikan.

Para ahli ekonomi juga berpendapat selain pendidikan dan pengangguran, inflasi juga merupakan salah faktor lahirnya kemiskinan. Mereka berpendapat bahwa inflasi yang lunak dapat menjadi gawat jika tidak dapat dikendalikan dengan cukup baik oleh pemerintah yang posisinya sebagai pengendali utama perekonomian suatu Negara. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (2013) mengungkapkan tingginya laju inflasi bisa menaikkan garis kemiskinan. Pasalnya, harga barang dan jasa menajadi salah satu penentu tolak ukur garis kemiskinan. Dan, tentu saja kenaikan inflasi pasti akan menaikkan tingkat kemiskinan.

Selain masalah ekonomi, pendidikan juga menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tuban, Bupati Tuban Fathul Huda sendiri melihat perkembangan pendidikan di Tuban menurutnya masih kalah dari daerah lain. Baik soal kualitas maupun prestasinya, jika dibandingkan dengan Pendidikan di Lamongan, Tuban masih cukup tertinggal baik sekolah negeri maupun swastanya. Menurutnya, ada banyak sekali hal yang harus dibenahi di bidang pendidikan Kabupaten Tuban, baik lembaganya, manajemen sampai dengan sumber daya manusia (SDM) dan juga masyarakatnya. Untuk dunia pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tuban tidak segan untuk mengeluarkan anggaran lebih. Karena itu Dewan Pendidikan diminta untuk membantu menciptakan dan meningkatkan pendidikan yang lebih berkualitas untuk Tuban kedepannya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pada tahun 2018 menyebutkan bahwa kondisi pengangguran di Kabupaten Tuban cukup memprihatinkan, dimana angka pengangguran mencapai 3,3 persen atau setara dengan 22 ribu jiwa dari jumlah penduduk per 24 April 2018 yang menunjukkan angka 1.315.155 jiwa dan cukup tinggi di Jawa Timur. Dikatakannya, jumlah tersebut merupakan tingkat pengangguran terbuka, artinya yang benar-benar tidak bekerja apapun atau tidak sama sekali. Berbeda lagi dengan semi pengangguran yang terkadang masih bekerja walaupun secara hitungan jam masih dianggap minim, contohnya makelar.

Mengenai kondisi inflasi di Kabupaten Tuban, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menegaskan salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan di Tuban

disebabkan inflasi harga sejumlah kebutuhan dasar rumah tangga. Survey BPS Tuban untuk mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan daya beli perkapita setiap keluarga menunjukkan kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,06 persen disebabkan oleh inflasi harga pokok. Disebutkan, dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yang diterapkan Pemerintah Tuban bisa mengukur dari sisi pengeluaran setiap penduduk, baik kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Dengan demikian pihaknya bisa mengetahui rata-rata pengeluaran perbulan dibawah garis kemiskinan atau tidak.

Sementara itu faktor penyebab kemiskinan secara umum menurut kesimpulan para ahli Bayo Ala (1981), Ndaru Mursito (1981) dan Koentjaraningrat (1983) adalah terdapat dua jenis yaitu faktor eksogen (faktor yang berada di luar individu tersebut) dibedakan menjadi faktor alamiah (keadaan alam, iklim, dan bencana alam) dan faktor buatan atau struktur (kolonialisme, sifat pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya). Sedangkan faktor endogen (faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri) misalnya sifat fatalis, malas, boros, konformis, dan sebagainya.

Menurut Yacoub (2012) Agar masalah kemiskinan tidak semakin mematikan setiap harinya, maka pemerintah harus meletakkan kemiskinan sebagai pusat perhatian, beberapa ahli menyebutkan penanggulangan kemiskinan yang paling jitu adalah dengan menciptakan aktivitas ekonomi pada daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang ada nantinya diharapkan mampu melahirkan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat mengurangi tingkat

pengangguran yang ada, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu yang pada akhirnya dapat pula mengurangi kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Sektor Industri berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban?
2. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban?
3. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban?
4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan sektor industri terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini dapat diambil manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan informasi ilmiah bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik dan sekaligus melatih diri untuk menetapkan masalah dan juga untuk memberikan alternatif pemecahan.
3. Dapat memberi informasi dan sebagai sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan pemecahan masalah dalam hal penetapan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan.